



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Perencanaannya Ridak Profesional

### Marak Anggaran Bernilai Fantastis

JAKARTA - Pengelolaan anggaran Pemprov DKI Jakarta dinilai tidak cermat. Hal itu dibuktikan dengan penghitungan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 yang berubah dari Rp95,995 triliun terpaksa turun sekitar Rp6,5 triliun menjadi Rp 89,4 triliun.

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor mengatakan, adanya revisi anggaran di tengah jalan sudah bisa dikatakan perencanaan yang tidak profesional. Seharusnya, perencanaan ini sudah bisa diprediksi dari jauh-jauh hari. "Kalau tidak cermat seperti ini, maka bisa berantakan dan merugikan masyarakat," kata dia, Selasa (29/10/2019).

Tigor menambahkan, atas revisi itu tentu berdampak banyak pemangkas sejumlah program. Sepatutnya, Pemprov DKI tidak bersikap boros dalam membelanjakan keuangan daerah. Sehingga, besarnya belanja itu tidak akan membebani masyarakat. "Karena nantinya masyarakat akan dibebani dengan menaikkan pajak. itu pasti akan terjadi," tandas dia.

Menurut dia, masalah penganggaran sebaiknya dilakukan kajian yang matang sebelum ditulis dalam rencana anggaran. Sehingga, tidak ada yang dikorbankan jika penghitungan tersebut salah. "Kalau sekarang ini kan banyak yang di korbankan. Seharusnya di prioritaskan yang mana-mananya," imbuh dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) DKI Faisal Syafruddin mengatakan, pemicu terjadinya defisit anggaran pada 2020 karena belum adanya biaya transfer dari pemerintah pusat ke Pemprov DKI. Sehingga, perlu ada upaya koreksi dalam belanja daerah. "Ya, memang tidak ada transfer biaya bagi hasil pajak," kata dia, Selasa (29/10/2019).

Faisal mengaku, biaya yang belum di transfer itu adalah biaya bagi pajak yang seharusnya disetor ke kas dae-

rah Pemprov DKI setiap tahun sebesar Rp6 triliun. Dengan tidak adanya pengembalian uang itu, maka bisa dikatakan pemerintah utang kepada Pemprov DKI. "Karena tidak ada transfer dana itu ke DKI," beber dia.

Meski begitu, sambung Faisal, atas ketiadaan biaya bagi hasil pajak dari pemerintah pusat, maka berdampak kepada pengelolaan belanja 2020. Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terpaksa melakukan efisiensi anggaran ■

"Diperlukan efisiensi dari masing-masing dinas," tandas dia.

#### Anggaran ERP Capai Rp150 Miliar

Setelah batal lelang di 2019, program Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar kembali dianggarkan pada 2020. Tak tanggung-tanggung nilai anggaran yang membebankan kas daerah mencapai Rp150 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Lupito mengatakan, usulan anggaran ini sudah dibahas bersama dengan komisi B (bidang transportasi) DPRD DKI Jakarta. Rencananya, proyek ERP ini baru akan dioperasikan pada triwulan ke empat 2020. "Anggaran untuk ERP sebanyak Rp150 miliar," kata dia, Selasa (29/10/2019).

Syafrin menambahkan, program jalan berbayar ini merupakan bagian dari program pengentasan kemacetan dan polusi udara di Jakarta. Dan rencananya, ERP akan ditempatkan di 25 ruas jalan yang sekarang masih diterapkan sistem ganjil genap. "Masih sama penempatannya dengan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap," ujar dia.

Bahkan, diakui dia, ERP nantinya akan diterapkan dengan skema retribusi sesuai Peraturan Pemerintah No 97/2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Besaran tarif retribusi kenda-

raan bermotor yang melintasi kawasan ERP akan ditetapkan dalam peraturan daerah. "Regulasinya PP Nomor 97 sudah menyebutkan bahwa untuk ERP itu tarifnya retribusi," kata dia.

Dia mengaku, nantinya proyek ERP bakal menjadi kebijakan permanen untuk membatasi penggunaan kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Namun, sambil menunggu realisasinya, Pemprov DKI masih menerapkan kebijakan perluasan ganjil genap. "Kebijakan ini hanya sementara saja menunggu ERP terlaksana," imbuh dia.

Lebih jauh, jelas Syafrin, penerapan ERP sebenarnya sudah berproses sejak 2005 lalu. Namun, hingga 2019, belum ada satu pun pemenang tender yang ditetapkan Pemprov DKI. "Oleh Gubernur DKI, diminta legal opinion ke Jaksa Agung, disana lalu disarankan tender untuk dibatalkan," imbuh dia.

Sementara itu, Pengamat Perkotaan Yayat Surpyatna mengatakan, selain menerapkan sistem elektronik Road Pricing (ERP), Pemprov DKI harus mengatasi sejumlah hambatan. Salah satunya, pengawasan soal pedagang kaki lima dan penataan parkir. "Lihat saja bagaimana tidak mau macet, parkir dimana-mana dengan memakai badan jalan," kata dia.

Menurut dia, harus ada pengawasan yang lebih ekstra untuk jalur alternatif. Semisal, penempatan petugas lebih ditingkatkan lagi. Sebab, dia menilai, petugas Dishub lebih terfokus untuk mengawasi ganjil genap. "Seperti senang sekali melakukan tindakan pelanggaran, padahal pengaturan lalu lintas yang harus ditingkatkan," tandas dia.

#### Dinas Pariwisata Tetap Berkelit

Meski sudah dibatalkan rencana membiayai lima influencer sebesar Rp5 miliar pada APBD

2020, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta tetap berkelit dana itu diperuntukan sejumlah kegiatan. Mereka keberatan kalau semua dana itu untuk membiayai influencer.

"Setelah kita lihat ternyata anggaran kita ada yang tidak cukup, makanya hanya berkolaborasi tanpa menggunakan dana APBD, dan sudah kami putuskan untuk dihapus," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi, Selasa (29/10/2019).

Edy mengaku, awalnya belanja Rp5 miliar itu untuk keperluan belanja event dan biaya promosi atau iklan pariwisata dan kebudayaan DKI. Jadi, bukan dipahami masing-masing influencer dibiayai Rp 1 miliar. "Di dalamnya itu ada macam-macam, ada belanja even dan biaya publikasi. Jadi bukan untuk influencer semua," ungkap dia.

Keinginan keras untuk mempromosikan pariwisata DKI itu, diakui Edy sudah lama diterapkan bertahun-tahun. Biasanya, sejumlah influencer sengaja diundang untuk dibawa ke tempat wisata di Jakarta. Mereka diajak ke enam sampai tujuh even yang ada.

"Waktu itu kami namakan 'family trip'. Jadi kita undang mereka dari luar dan biaya akomodasi kita fasilitasi, kita bawa mereka ke tempat wisata disitu mereka menulis," tambah dia.

Tapi kini, sambung Edy, alokasi anggaran itu sudah urung dilaksanakan dan dialihkan untuk keperluan ajang balap mobil listrik, Formula E.

Meski begitu, pihaknya kata dia, akan berkolaborasi dan memaksimalkan media sosial. Maka dengan cara itu anggaran yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. "Bulan Oktober 2019 ini kan anggarannya sudah kita geser ke Formula E," kata dia.

Sejauh ini diakui Edy, pihaknya sudah mengurangi 30 persen

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Perencanaannya Ridak Profesional

alokasi anggaran belanja 2020. Hal itu dilakukan untuk mendukung event besar di Jakarta pada 2020, yakni formula E. "Penghapusan ini bukan karena ramai diributkan di media, tapi karena ada event Formula E. Kita pikir tidak usah gunakan influencer dari luarlah, pakai kolaborasi saja," beber dia.

Sebelumnya, Pemprov DKI berencana membiayai lima Influencer (pemilik follower terbanyak di media sosial) di tahun 2020 sebesar Rp5 miliar. Tapi niat itu kandas untuk direalisasikan.

Rencana pembiayaan itu terkuak di dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2020. Disitu tertulis penvelenggaraan aktivitas promosi pariwisata dan budaya melalui media sosial'. Sasarannya adalah 'Jumlah influencer aktivitas promosi pariwisata dan budaya melalui media sosial'.

Targetnya, ada lima influencer yang diikutsertakan. Anggaran untuk kelima Influencer untuk mempromosikan pariwisata Ibu Kota ini sebesar Rp 5.008.691.930,00. Namun, di perjalanan anggaran itu dihapus karena terkena efisiensi anggaran bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengaku terkejut dengan rencana alokasi anggaran sebelumnya yang diusulkan Dinas Pariwisata DKI. Bukan itu saja, dirinya mempertanyakan perihal menjadikan influencer sebagai mitra.

"Kenapa harus memilih influencer dari luar negeri, kenapa tidak dalam negeri. Apalagi, sudah dicoret itu setelah ramai begitu, ada dasarnya di hilangkan," tandas dia.

Dia menambahkan, seharusnya Pemprov DKI Jakarta memikirkan bagaimana cara mempermudah masyarakat untuk mengakses ke tempat pariwisata. Salah satunya, bisa saja dengan menambah moda transportasi yang terintegrasi di kawasan itu. "Karena ada beberapa daerah di Jakarta yang belum terjangkau angkutan transportasi umum," tukas Gilbert.

Komisi B DPRD DKI Jakarta memastikan tidak akan menyetujui anggaran influencer senilai Rp5 miliar yang diusulkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pasalnya, dianggap melakukan pemborosan anggaran dan tak bersentuhan dengan masyarakat.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sina-ga mengatakan, usulan yang sempat diajukan oleh Disparbud DKI merupakan bentuk pemborosan anggaran.

"Buat apa anggaran influencer dalam mempromosikan pariwisata? Itu pemborosan harusnya dinas bisa berkolaborasi dengan swasta untuk memunculkan geliat pariwisata dan kebudayaan DKI," ujar dia kepada INDOPOS di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Politisi PDI Perjuangan itu menyebut, sebaiknya pemerintah daerah mengutamakan kegiatan yang bersentuhan

dengan masyarakat. Mengenai promosi pariwisata dan kebudayaan, sambung Pandapotan, itu bisa dilakukan bila pemerintah menggandeng pihak swasta melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta meradang. Hal itu terkait pembatalan rencana anggaran Rp5 miliar lebih untuk lima influencer. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat merencanakan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), tepatnya pada dokumen Lampiran III Komisi B.

Politisi Partai Gerindra Syarif menilai, rencana anggaran Rp5 miliar lebih untuk lima influencer sebenarnya merupakan rencana yang baik. Bahkan, kalau perlu, bukan cuma lima influencer, tapi 15 influencer media sosial sekalian yang dikontrak Pemprov DKI. "Anggaran itu bagus sebenarnya, tapi karena kondisi pendapatan APBD yang menurun, itu sangat tidak tepat," ungkap dia kepada INDOPOS saat dihubungi, Minggu (27/10/2019). (dny/aen)